

ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. BANK PAPUA

Yosina Ivon Wanane¹, Dewiyanti Sangkek², Denny Tewu³

Universitas Kristen Indonesia^{1,2,3}

2204190016@ms.uki.ac.id¹, 2204190012@ms.uki.ac.id², Denny.tewu@uki.ac.id³

Abstrak

Penerapan good corporate governance (GCG) telah menjadi isu sentral dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan perkembangan ekonomi global, perusahaan dituntut untuk mengadopsi sistem pengelolaan dan pengendalian manajerial yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko pada PT. Bank Papua serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG di PT. Bank Papua sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti pengetatan kredit, efisiensi produk yang belum optimal, standar SDM yang tinggi, dan kasus internal fraud. Dengan adanya GCG yang efektif, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Kata kunci: good corporate governance, manajemen risiko, Bank Papua, transparansi, akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997-1998, termasuk Indonesia, menunjukkan pentingnya penerapan GCG yang baik. Baird (2000) menyatakan bahwa salah satu penyebab utama krisis ekonomi di Indonesia adalah buruknya pelaksanaan corporate governance di berbagai perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta. Perhatian terhadap corporate governance semakin meningkat setelah terjadinya skandal besar seperti Enron dan Worldcom yang menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang independen oleh dewan direksi (Kaihatu, 2006).

Dengan meningkatnya perhatian terhadap pentingnya penerapan GCG, pemerintah Indonesia, bersama dengan pelaku bisnis, menyepakati penerapan GCG sebagai bagian dari reformasi ekonomi, yang ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) dengan IMF pada tahun 1998 (Sulistyanto, 2003). Selain itu, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) dibentuk pada tahun 1999 sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola perusahaan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko di PT. Bank Papua serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Governance

Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapatkan hak-haknya dengan adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Pratama, 2012). Penerapan GCG yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan (Restuti, 2012).

Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. ISO 31000:2018 menyatakan bahwa manajemen risiko harus terintegrasi ke dalam semua aspek organisasi dan dilakukan secara sistematis untuk memastikan efektivitasnya (Susilo & Kaho, 2018).

Di sektor perbankan, penerapan manajemen risiko sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, termasuk Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menjadi acuan bagi bank-bank di Indonesia dalam mengelola risiko..

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan GCG dan manajemen risiko di PT. Bank Papua. Pendekatan deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai situasi yang dihadapi oleh PT. Bank Papua berdasarkan fakta-fakta yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Perusahaan Sejarah Singkat Bank Papua

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua yang sebelum menjadi Perseroan Terbatas bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irian Jaya ini didirikan pada tanggal 13 April 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat Nomor:37/GIB/1966 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Irian Barat Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 23 Maret 1970 pada Lembaran Daerah Propinsi Irian Barat no. 42 tahun 1970, kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep.283/DDK/II/1972 tanggal 15 Juli 1972 tentang pemberian izin usaha Bank Pembangunan Daerah Irian Barat berkedudukan di Jayapura melaksanakan operasional sebagaimana Bank Umum lainnya dengan Modal Dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp.4.000.000,-.

Gambaran Umum GCG di Bank Papua

Bank Papua (2006) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktek-praktek GCG yang konsisten akan memberikan manfaat baik bagi bank kepercayaan nasabah, pemegang saham, mitra bisnis dan pihak lain yang berkepentingan. Dalam memastikan pelaksanaan GCG yang optimal, Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan bersama dengan manajemen mengevaluasi implementasi GCG perusahaan secara berkesinambungan. Dalam laporan Pelaksanaan GCG tahun 2011 terdapat pula hasil summary perhitungan nilai komposit self assessment GCG . Bank Papua berada pada angka dua yang termasuk kategori baik menurut standar Bank Indonesia. Aspek-aspek yang dinilai dalam self-assesment tersebut antara lain : Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Kepatuhan, Penerapan fungsi audit Intern, Penerapan fungsi audit

Ekstern, Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposure), Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal, Rencana Strategis Bank.

Penarapan Manajemen Resiko pada PT.Bank Papua

Penerapan manajemen risiko pada Bank Papua mengacu pada pedoman OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum No. 18/POJK.03/206 tanggal 26 Maret 2016 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka Manajemen Risiko terintegrasi (RMF) yang mencakup Tata Kelola Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko dan Alat Manajemen Risiko diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

Tata Kelola Manajemen Resiko

Untuk memastikan efektivitas dan konsistensi penerapan Kerangka Manajemen Risiko, Bank Papua membutuhkan struktur tata kelola yang kuat. Dalam hal ini, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Papua bertanggung jawab untuk mengawasi, memantau dan mengelola risiko yang dihadapi oleh Bank Papua serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan organisasi untuk memastikan bahwa semua unit kerja memahami strategi, tingkat risiko yang diambil, dan kerangka kerja Manajemen Risiko Bank Papua. Dalam melakukan tugas-tugas tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (ROC) yang bertanggung jawab untuk meninjau semua bidang risiko dan menganalisis bidang-bidang lain yang terkait dengan risiko, pengendalian mitigasinya serta potensi kerugian. Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Direksi untuk menerapkan kerangka kerja Manajemen Risiko. Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi telah membentuk berbagai komite, termasuk Komite Manajemen Risiko (RMC). Dalam memantau, mengendalikan, dan mengelola risiko, Bank Papua telah menerapkan prinsip Pendekatan Tiga Garis Pertahanan.

Pertahanan Lini Pertama, Unit Bisnis bertanggung jawab untuk mengendalikan, dan memitigasi risiko dalam bisnis. Manajemen Senior dan Komite Manajemen Risiko menjalankan peran penting untuk memastikan efektivitas fungsi unit bisnis secara keseluruhan sebagai “Pertahanan Lini Pertama” untuk mengembangkan risiko dan mengendalikan lingkungan sebagai bagian dari kegiatan operasional rutin.

Pertahanan Lini Kedua Pertahanan lini kedua sebagai fungsi pemantauan independen dibangun oleh Divisi Manajemen Risiko independen dan Divisi Kepatuhan yang berfungsi sebagai unit-unit utama. Secara umum, selain memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan Bank Papua dan regulator lainnya, lini pertahanan kedua bertanggung jawab untuk menetapkan batas, pedoman, dan arahan melalui pengembangan kebijakan, tinjauan dan persetujuan batas risiko. Risiko Bank berlandaskan pentingnya Manajemen Risiko untuk keberhasilan bisnis, keuangan, dan reputasi. Oleh karena itu, pengembangan rencana bisnis Bank Papua berlandaskan pada perspektif bahwa keseimbangan yang baik antara risiko dan manfaat harus dipertahankan untuk mencapai pertumbuhan jangka panjang bagi pemegang saham.

Pertahanan Lini Ketiga Sebagai pertahanan lini ketiga, Audit Internal bertanggung jawab untuk memberikan jaminan, nilai tambah dan kegiatan konsultasi independen serta membantu Bank Papua untuk mencapai tujuannya.

Alat Manajemen Risiko

Sebagaimana dimaksud dalam Risk Appetite Statement (RAS) serta kebijakan dan prosedur, Alat Manajemen Risiko berfungsi sebagai pedoman untuk penerapan RMF. Untuk mewujudkan misinya bagi para pemangku kepentingannya, Risk Appetite Statement menguraikan tingkat dan karakteristik risiko yang diambil oleh Bank. Direksi dan manajemen senior bertanggung sambil memastikan bahwa kebijakan terperinci yang berkaitan dengan pembatasan bagi organisasi terhadap kegiatan Bank telah dinyatakan dalam Kerangka Manajemen Risiko, yang konsisten dengan RAS dan kapabilitas Bank. Bank menetapkan batasan risiko dengan memperhitungkan kemampuan modal Bank untuk menyerap eksposur risiko, mengelola kerugian sebelumnya, meningkatkan keterampilan sumber daya manusianya dan mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Prosedur dan penetapan batas risiko mencakup akuntabilitas dan tingkat kewenangan yang jelas, dokumentasi prosedur yang memadai, dan penetapan batas sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Bank. Sesuai dengan implementasi Pilar II Basel II di Indonesia, Bank telah mengembangkan metode untuk menerapkan Proses Penilaian Kecukupan Modal Internal (ICAAP). Proses ini bertujuan untuk memastikan kecukupan modal sesuai yang termasuk dalam Pilar I. Eksekusi ICAAP di Bank berdasarkan pada keyakinan bahwa perhitungan kecukupan modal harus mampu menyerap potensi kerugian dari risiko material. Dengan demikian, penentuan kecukupan modal melalui penggunaan metode ICAAP, selain melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) risiko utama yang termasuk dalam Pilar I (Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional), juga mencakup 7 (tujuh) risiko lainnya, yaitu Risiko Konsentrasi Kredit, Risiko Suku Bunga dalam Banking Book, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategis, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Manajemen Risiko berfokus pada Perbaikan struktur organisasi, Perbaikan proses kredit, Penyelesaian Non Performing Loan (NPL) dan AYDA, Memperkuat penerapan Risk Appetite untuk menjadi alat bagi manajemen senior untuk memantau proses manajemen risiko. Sejalan dengan persetujuan Risk Appetite oleh Dewan Komisaris pada bulan Juli 2018 yang mencakup 15 metrik, Bank telah memiliki Target Market dan Kriteria Penerimaan Risiko (RAC) yang memungkinkan pengembangan bisnis kredit Bank menjadi lebih terstruktur dan sejalan dengan Risk Appetite Bank, Memperbaiki struktur pendanaan dengan mengurangi ketergantungan tinggi pada pendanaan wholesale utama yang timbul dari lembaga keuangan non-bank untuk mengurangi tekanan berlebih pada rasio likuiditas seperti LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan NSFR (Net Stable Funding Ratio), Peningkatan manajemen risiko operasional, Peningkatan kerangka kerja Manajemen Kontinuitas Bisnis Bank Implementasi proses penilaian mandiri melalui perangkat RCSA (Risk and Control Self Assessment) dan Indikator Risiko Utama dimulai pada tahun 2018 dengan mengeluarkan prosedur RCSA dan KRI untuk beberapa divisi yang akan berlanjut pada tahun 2019. Proses penilaian mandiri bertujuan awal pengendalian kelemahan yang diharapkan untuk mencegah dan meminimalkan potensi risiko yang dihadapi Bank, Peningkatan berbagai aspek yang melibatkan banyak divisi di Bank melalui Turnaround Project. Turnaround Project mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia, proses, teknologi, kebijakan dan prosedur, dan tata kelola, 10. Peningkatan pengendalian pada keamanan informasi. Sehubungan dengan berbagai serangan dunia maya dan pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Bank terus meningkatkan manajemen keamanan informasi dengan menerapkan pengendalian, Keterbatasan akses email Bank di luar jaringan internal kantor termasuk penggunaan di ponsel. Penyaringan untuk email yang dikirim ke pihak luar dimana email akan dikarantina terlebih dahulu jika diduga mengandung data/ informasi sensitif, Penerapan Metodologi MORA (Material Risk Operational Assessment), Peningkatan risk awareness (kesadaran risiko) dan pemahaman

mengenai risiko operasional melalui pelatihan yang dilakukan oleh Divisi Operational Risk dan Group Operational Risk

. Manajemen risiko dalam penelitian ini terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

KESIMPULAN

Penerapan GCG dan manajemen risiko di PT. Bank Papua telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi. Penerapan GCG yang efektif dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan investor. Bank Papua diharapkan dapat terus meningkatkan penerapan GCG dan manajemen risiko untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Isi daftar pustaka ditulis dengan font Gill Sans MT, Normal, font 12 dan ditulis 1 spasi. Daftar Pustaka merupakan sumber acuan/ rujukan yang dijadikan bahan kutipan penulisan naskah. Penulisan daftar pustaka merupakan sumber acuan/rujukan yang dijadikan bahan kutipan penulisan naskah. Penulisan daftar pustaka menggunakan aturan The Chicago Manual of Style (CMS). Jumlah sumber rujukan yang dijadikan daftar pustaka naskah minimal 10 judul lieteratur ilmiah (80% refrensi primer, dan 20% refrensi sekunder). Sumber referensi primer, seperti: jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan makalah prosiding. Sumber referensi sekunder, seperti: buku dan sumber internet. Sebaiknya penulisan kutipan menggunakan aplikasi refrence manager Mandeley

Daftar Pustaka

- Baird, I. S. (2000). Corporate Governance and the Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*, 58(1-2), 141-186.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 8(1), 1-9.
- Pratama, A. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(3), 200-210.
- Restuti, I. (2012). Implementasi Good Corporate Governance dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(2), 76-87.
- Safari Shateri, M., Shateri Baghiabadi, S., & Hozhabrnejad, M. (2016). Risk Management in the Banking Sector: A Study on the Factors Leading to Financial Crisis. *International Journal of Financial Studies*, 4(3), 1-12.
- Susilo, L. J., & Kaho, V. R. (2018). *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 untuk Industri Non-Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistyanto, H. (2003). Corporate Governance dan Krisis Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 34-45.